

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ukuran laba dan komponen-komponennya memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang disebut pelaporan keuangan (Hary , 2015:7). Menurut Yadiati (2007 :52) laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, seperti informasi tentang sumberdaya perusahaan, pendapatan, biaya sekarang, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup adalah pelaporan keuangan.

Satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya adalah sumber daya manusia. Upaya organisasi dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh semua potensi sumber daya manusia (Soetrisno,2009:4). Menurut Ihksan (2008:2) bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang yang bersumber dari dalam dirinya adalah sumber daya manusia. Sumber tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, bakat, kepemimpinan, dan lain-lain. Arti penting sumberdaya manusia bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada pada perusahaan. Hal serupa disampaikan oleh Sumarsono (2003:4) bahwa manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja adalah sumber daya manusia. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat maka Mulyani (2019) mengatakan bahwa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan APBN kepada masyarakat kementerian keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Salah satu indikator akuntabilitas tersebut tercermin dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang dibuat. Maka dari itu kualitas laporan sangatlah penting bagi instansi pemerintah maupun perusahaan.

Fenomena yang terjadi pada kualitas pelaporan keuangan diungkapkan oleh Nurafiah (2018), Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Pusat menilai bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sebenarnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Tetapi belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Menurutnya kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, pihaknya menginginkan agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan. Agar hal itu dapat terwujud, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian auditor didorong untuk selalu memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan itu agar kualitas pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, dia juga meminta kepada para akuntan

untuk aktif melakukan riset. Tujuannya, agar mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Kemudian hasil riset tersebut dapat diterapkan menjadi dasar regulasi nantinya.

Fenomena serupa disampaikan oleh Isma (2018) anggota V Badan Pemeriksa Keuangan bahwa masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut di antaranya temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasilitas sosial fasilitas umum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal, penatausahaan belanja dan kas atas dana BOS, dan bantuan operasional pendidikan belum memadai. Pemprov DKI juga melakukan keterlembatan penyelesaian sejumlah proyek, yaitu pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas. Dia menegaskan opini WTP hanya merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun, itu tidak menjamin proses anggaran bebas dari penyimpangan di kemudian hari.

Ada fenomena lain yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yaitu sumber daya manusia. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf (2017) yaitu tiga alasan lembaganya tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya, masalah sumber daya manusia (SDM). Hal senada diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut akan memperbaiki SDM agar tak kembali disclaimer. Tanpa memaparkan jelas, dia

mengaku bila ada yang tak koordinatif dalam penyusunan laporan keuangan kementerian.

Profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Peran akuntan dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2018) sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak setiap institusi. Hal ini karena kualitas informasi dari laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi.

Dalam penelitian sebelumnya, Dewi dan Rini (2018) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Wansyah, Darwanis, dan Bakar (2012) mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD.

Berdasarkan uraian-uraian dari pengertian, fenomena dan penelitian sebelumnya yang dikemukakan sebelumnya maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan variable kualitas sumber daya manusia yang ada dan kualitas pelaporan keuangan serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademisi

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji dan mengembangkan masalah kualitas pelaporan keuangan.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dan memberikan informasi mengenai pengaruh yang di timbulkan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi serta dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sejenis.